



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Ketenagakerjaa adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menyusun Renja Dinas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Ketenagakerjaan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETENAGAKERJAAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Ketenagakerjaan wajib melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan
- (2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 46

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Ketenagakerjaan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Renja Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Ketenagakerjaan /lintas Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Ketenagakerjaan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Ketenagakerjaan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 101

**BAB I
PENDAHULAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Perubahan Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 Menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Komponen - komponen Perubahan Renstra ini mengacu pada Perubahan Renstra Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis untuk mengimplementasikan sasaran - sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja. Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan memuat indikasi daftar program yang akan melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya perubahan Perangkat Daerah menjadi OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

Perubahan Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang, PERUBAHAN RPJMD, Perubahan Rencana Strategis Kemenaker dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur. Dalam hal tersebut Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Terhadap Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu di lakukan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten, maka seluruh Perubahan Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan perlu disempurnakan atau ditajamkan.

Hubungan Perubahan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, dari satu sisi merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PERUBAHAN RPJMD); dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Sebagai Dokumen Induk Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja Bidang dan Seksi – Seksi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berisikan Program – program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program – Program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam Perubahan Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Program – program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Tercapainya sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

1.1.1 Hubungan PERUBAHAN RPJMD Dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

A. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan PERUBAHAN RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan PERUBAHAN RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2018 - 2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2006-2025.

B. Hubungan Perubahan RPJMD dan RTRW

Penyusunan PERUBAHAN RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pasuruan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pasuruan.

C. Hubungan PERUBAHAN RPJMD dengan Perubahan Renstra SKPD

PERUBAHAN RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Perubahan Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis PERUBAHAN RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan.

D. Hubungan PERUBAHAN RPJMD dengan RKPD

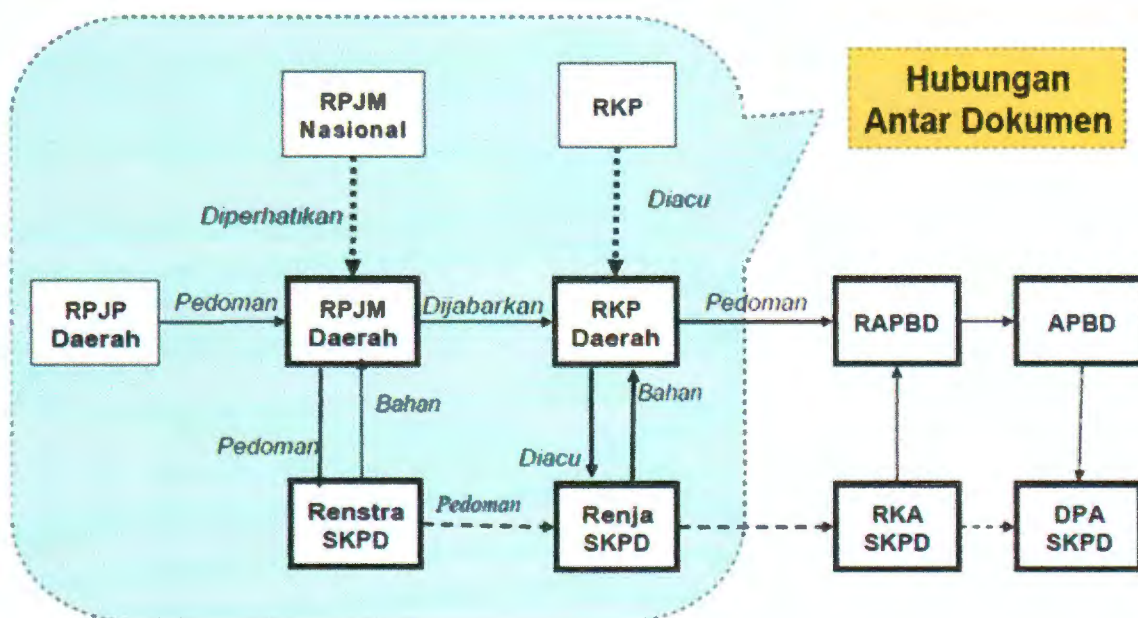
Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Perubahan Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam membuat Perubahan Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1

UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945
3. Landasan Konseptual :

- 1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2) Peraturan Presiden tentang RPJM Tahun 2019 ;
 - 3) Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
 - 4) Perda No. Tahun Tentang Perubahan PERUBAHAN RPJMD kabupaten Pasuruan;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Landasan Operasional :
- 1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 - 2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 4) Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 5) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
 - 6) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 - 7) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - 9) Inpres no. 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan gender (PUG);
 - 10) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
 - 11) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 13) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu di tetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dengan Peraturan Bupati Pasuruan;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023.
- 17) Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu di tetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dengan Peraturan Bupati Pasuruan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 adalah :

❖ **Maksud :**

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antara semua komponen,

mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Perubahan Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Adapun Tujuan penajaman Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah agar :

❖ **Tujuan :**

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai Penjabaran Visi, Misi dan Fokus Program Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan 2023;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun
3. Keterkaitan antara komponen Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan PERUBAHAN RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU STATEGIS BERDASARKAN TUGAS Dan FUNGSI

1.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

1.4 Telaahan rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Keberadaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berpedoman pada landasan hukum yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 177 tahun 2021 dan mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi Serta Tugas Pembantuan “

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 177 tahun 2021 adalah :

1. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan perencanaan program/kegiatan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- g. Pengelolaan administrasi dinas;
- h. Pengelolaan administrasi dinas di bidang-bidang Ketenagakerjaan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi tata laksana; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
- e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
 - b. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c. pengkoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pemagangan;
 - e. pengkoordinasian pelayanan pengelolaan informasi Pelatihan kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - f. penyebarluasan informasikonsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - g. pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas; dan
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - i. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan kerja;
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penempatan dan perluasan Kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan antar kerja kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - e. pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar Negeri kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
 - h. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian penempatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - k. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna;
 - l. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota;
 - m. pelaksanaan unit layanan disabilitas bidang Ketenagakerjaan, pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi bursa kerja khusus;

- n. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang ketransmigrasian; dan
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

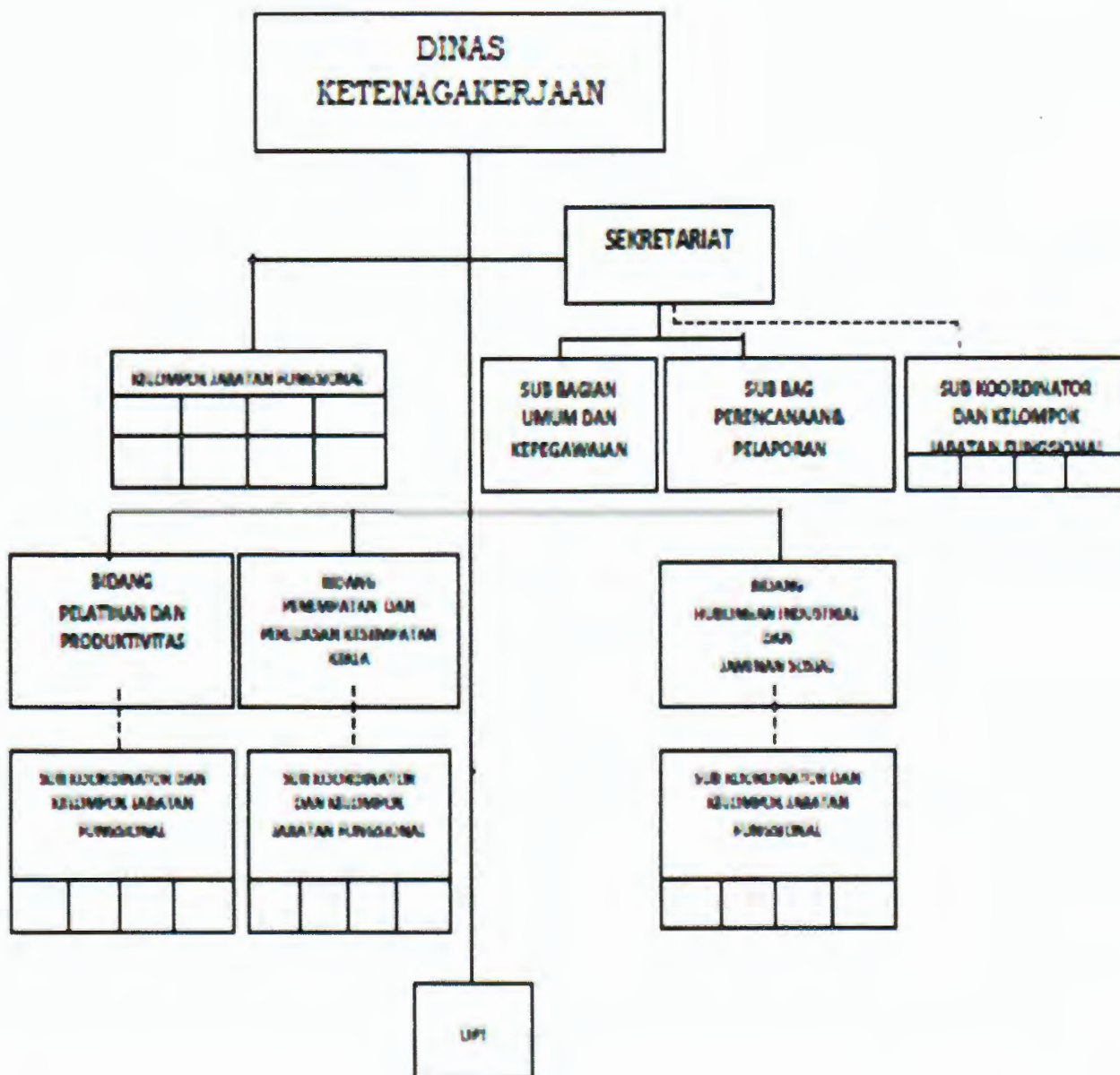
4. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial, pengembangan kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, Jaminan Sosial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten;
 - b. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten;
 - c. pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 - e. pelayanan pencatatan perijinan waktu kerja tertentu daerah kabupaten;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan pengupahan&jaminan sosial daerah kabupaten;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan LKS Tripartit daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - j. pelaksanaan verifikasi dan validasi permohonan pencatatan SP/SB di perusahaan;

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun 2017 didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 46 orang yang terdiri dari 38 orang PNS, 1 orang CPNS dan 6 orang tenaga honorer antara lain sebagai berikut :

a) Berdasarkan Bidang Kerja :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Jumlah Pegawai

| No. | Bidang | Jumlah |
|-----|--|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretariat | 10 |
| 3 | Bidang Pelatihan dan Produktifitas | 7 |
| 4 | Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | 8 |
| 5 | Bidang Hubungan Industri dan Jaminas Sosial | 9 |
| 6 | Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah | |
| | 1. UPTD BLK Rejoso | 4 |
| | Jumlah | 39 |

Berdasarkan jumlah pegawai dapat dilihat pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten pasuruan sebanyak 39 orang. Apabila dilihat dari komposisi yang menduduki jabatan eselon sebanyak 6 orang terdiri dari 1 orang Eselon II, 2 Orang Eselon III serta 3 Orang Eselon IV dan Pegawai sebanyak 27 orang pegawai yang tersebar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.

b) Berdasarkan Tingkat Golongan :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | IV | 5 |
| 2 | III | 33 |
| 3 | II | 8 |
| 4 | I | 0 |
| Jumlah | | 39 |

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan terbanyak berada pada golongan III sebanyak 33 orang. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan jumlahnya telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khusus bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | S3 | 0 |
| 2 | S2 | 7 |
| 3 | S1 | 20 |
| 4 | Diploma | 0 |
| 5 | SMA | 11 |
| 6 | SMP | 1 |
| 7 | SD | 0 |
| Jumlah | | 39 |

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai pendidikan S1 yaitu sebanyak 20 orang dari seluruh pegawai. Dengan demikian, apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini dianggap telah cukup memadai perbandingan dengan jenis pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas SDM saat ini beberapa pegawai yang berasal dari S1 melanjutkan pendidikan S2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan Dinas Ketenagakerjaan membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

d) Jabatan Fungsional :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Jabatan Fungsional

| No | Jabatan Fungsional | Jumlah |
|---------------|------------------------------|---------------|
| | Pengantar Kerja | 3 |
| | Mediator Hubungan Industrial | 3 |
| Jumlah | | 6 |

Disamping jenis jabatan struktural, terdapat 3 jenis jabatan fungsional di lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan jumlah total 6 orang, namun saat ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengalami kendala berupa minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional.

2. Perlengkapan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menempati 9 ruangan/gedung seluas 1301 m² dari luas tanah 6350 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut : Kendaraan roda empat sejumlah 11 (sebelas) buah dengan kondisi 1 (satu) buah jenis carry careta tahun 1997 dengan kondisi rusak sedangkan kendaraan roda dua sejumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu)

buah diantaranya dalam keadaan rusak berat tidak dapat dipergunakan. Untuk menunjang kegiatan administratif Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 12 unit, laptop sebanyak 1 unit, over head sebanyak 1 unit, wireless sebanyak 4 unit, faxsimile sebanyak 1 unit dan pesawat telepon sebanyak 2 unit. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, terampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan beretos kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menjamin setiap warga masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Pemerintah Kabupaten sebagai regulator ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan daerahnya. Disamping itu terhadap warga masyarakat yang telah bekerja, pemerintah daerah juga harus bisa menjamin bahwa seluruh pekerja memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. Keselamatan kerja, kesehatan kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan kebebasan berserikat harus dapat dirasakan oleh pekerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan bidang ketenagakerjaan diarahkan kepada semakin berkurangnya pengangguran dengan menciptakan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik investasi, terkendalinya tingkat kepadatan penduduk.

Rasio penduduk yang bekerja



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Sasaran yang akan dicapai pada urusan ketenagakerjaan adalah terciptanya peningkatan kualitas tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran di atas dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

1) Rasio penduduk yang bekerja

Capaian Kinerja Rasio Penduduk yang bekerja tahun 2017 sebesar 95,03% menurun sebanyak 55.403 orang atau sebesar 7,12% jika dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 833.966 orang. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang bekerja dan bila dibandingkan tahun kemarin, maka mengalami penurunan sebesar 1,42%. Penurunan ini disebabkan masih terasanya dampak krisis ekonomi global yang ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang masih belum membaik serta investor yang masuk banyak mengambil sikap pada efisiensi dengan kebijakan yang berorientasi pada pengguna mesin produksi (padat modal/bukan padat karya).

Rasio penduduk yang bekerja

Tabel Rasio Penduduk yang Bekerja

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Angkatan kerja (orang) | 905.668 | 912.079 | 934.495 | 870.347 | 819.322 | 819.322 | 875.737 | 868.795 |
| Yang bekerja (orang) | 866.716 | 874.956 | 908.686 | 833.966 | 778.563 | 778.563 | 829.988 | 814.614 |

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

2) Tingkat partisipasi angkatan kerja

Indikator ini adalah tersedianya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja (penduduk usia kerja) di Kabupaten Pasuruan. Indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- ❖ Tingkat pertumbuhan ekonomi
- ❖ Tingkat investasi yang masuk
- ❖ Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
- ❖ Peningkatan SDM melalui ketrampilan keahlian, sertifikasi serta kompetensi.
- ❖ Perkembangan perluasan kerja yang berorientasi pada kewirausahaan (minat usaha)
- ❖ Regulasi pemerintah pada bidang ketenagakerjaan

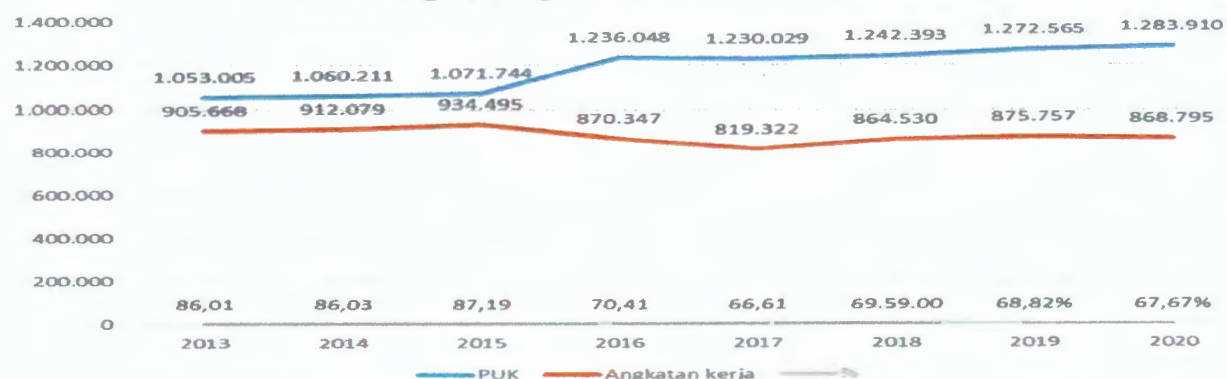
Pencapaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja tahun ini mengalami penurunan sebanyak (4,24%) dari target yang ditentukan sebesar 70.85 % tercapai sebesar 66,61 % hal ini disebabkan adanya :

- Investor banyak beralih pada padat modal dan menggunakan tenaga mesin sehingga banyak mengurangi tenaga kerja;
- Dalam kondisi MEA kesempatan kerja dituntut adanya sertifikasi dan kompetensi.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| PUK | 1.053.005 | 1.060.211 | 1.071.744 | 1.236.048 | 1.230.029 | 1.242.393 | 1.272.565 | 1.283.910 |
| Angkatan kerja | 905.668 | 912.079 | 934.495 | 870.347 | 819.322 | 864.530 | 875.757 | 868.795 |
| % | 86,01 | 86,03 | 87,19 | 70,41 | 66,61 | 69.59.00 | 68,82% | 67,67% |

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

3) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja baik yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI, maupun melakukan wirausaha secara mandiri.

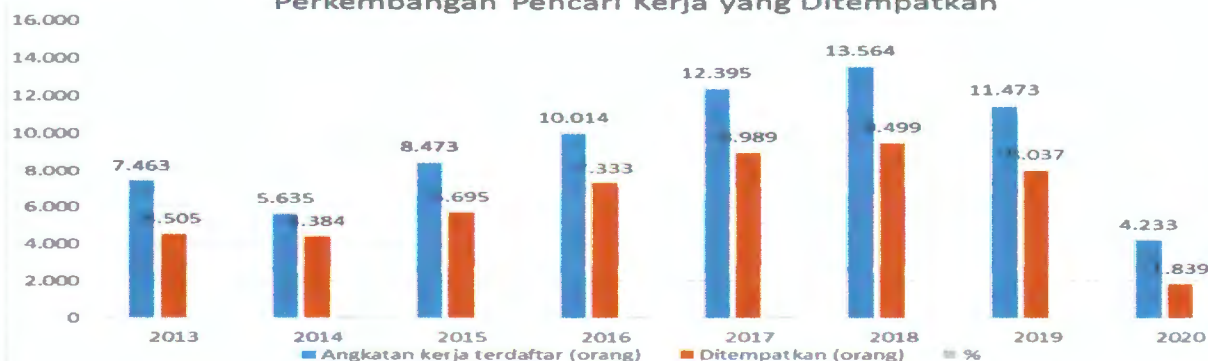
Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam mengatasi/mengurangi masalah pengangguran yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak 8.989 orang atau 75,52% dari 12.395 pencari kerja yang mendaftar. Kondisi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 69,5%. dan bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,29%. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja serta peluang kesempatan kerja terbuka melalui even atau job fair/job matching.

Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Angkatan kerja terdaftar (orang) | 7.463 | 5.635 | 8.473 | 10.014 | 12.395 | 13.564 | 11.473 | 4.233 |
| Ditempatkan (orang) | 4.505 | 4.384 | 5.695 | 7.333 | 8.989 | 9.499 | 8.037 | 1.839 |
| % | 60,36 | 77,79 | 67,21 | 73,23 | 75,52 | 70,03.00 | 70,05% | 43,44% |

Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan

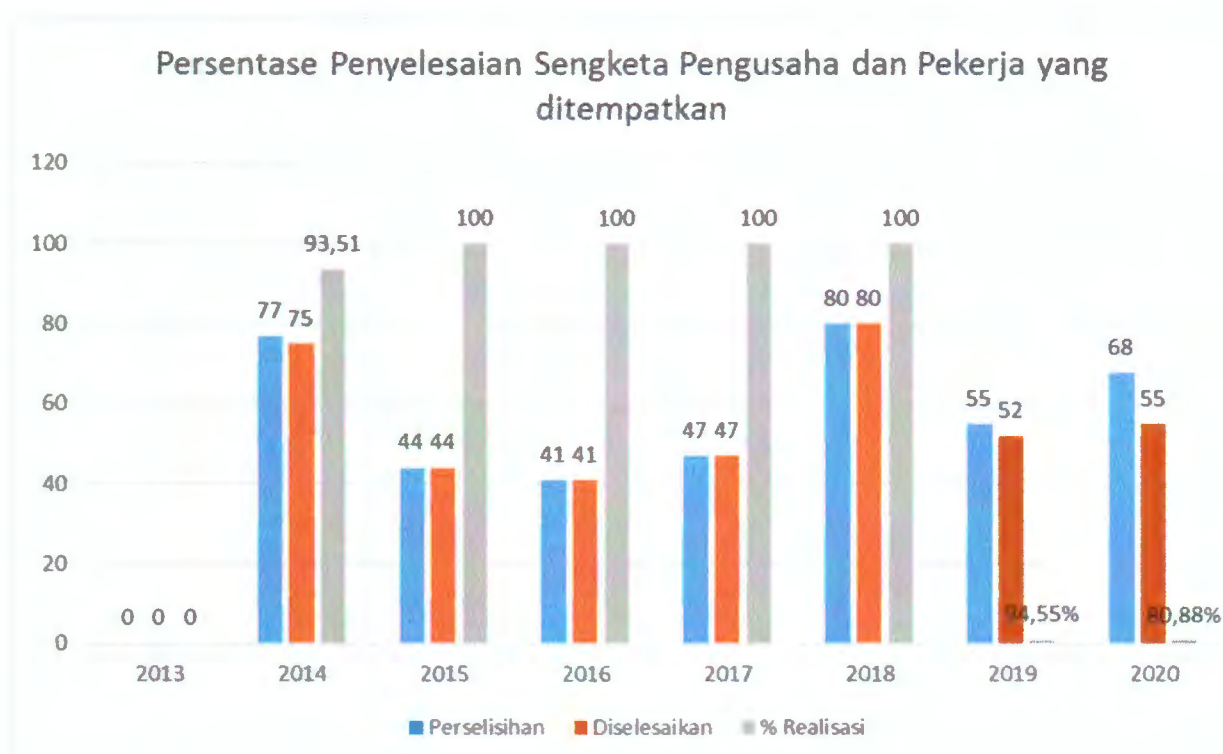


Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

4) Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun

Pada Tahun 2017 jumlah perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan karyawan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 47 kasus dengan rincian; PHK : 39 kasus, HAK : 16 kasus dan KEPENTINGAN : 5 kasus dan dapat diselesaikan semuanya kasus sebesar 100 %,.

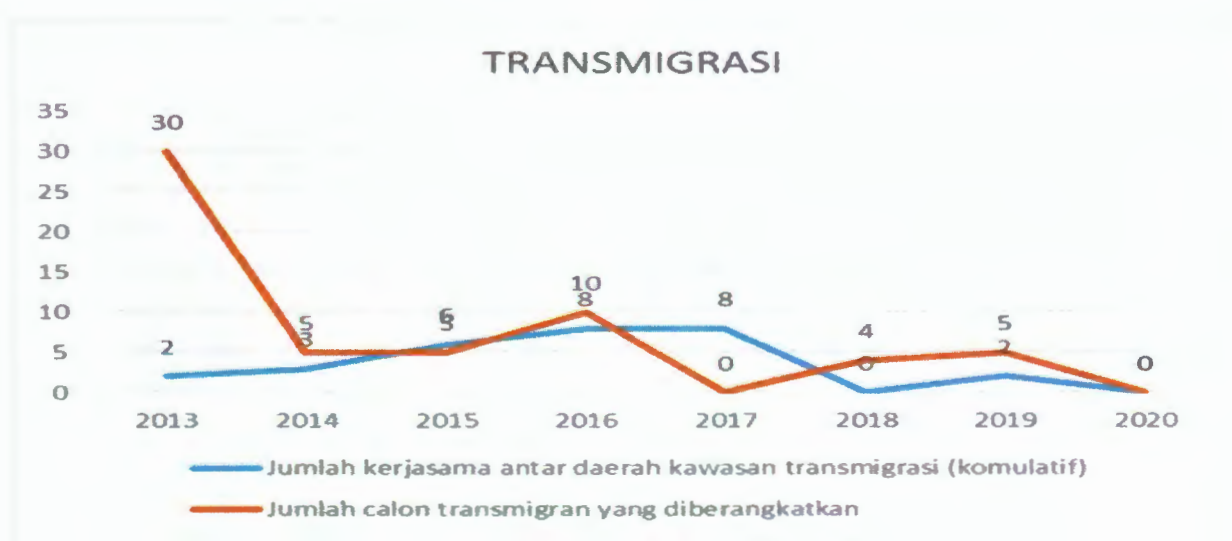
| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|------|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| Perselisihan | - | 77 | 44 | 41 | 47 | 80 | 55 | 68 |
| Diselesaikan | - | 75 | 44 | 41 | 47 | 80 | 52 | 55 |
| % Realisasi | - | 93,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,55% | 80,88% |



B. URUSAN TRANSMIGRASI

Jumlah kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi Indikator ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama dengan daerah otonom lain dalam program transmigrasi terutama di luar Pulau Jawa untuk menempatkan transmigrasi asal penduduk Kabupaten Pasuruan ke daerah tujuan transmigrasi baru.

| No. | Indikator kinerja pembangunan daerah | Satuan | Capaian | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi (komulatif) | Lokasi | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan | KK | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 |



Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi baik daerah pengirim transmigran maupun penerima transmigran memegang peranan yang

sangat penting bagi keberhasilan program transmigrasi. adapun daerah yang menjadi targetkerjasama dalam bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 antara lain :

1. Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Kabupaten Dounggala Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kabupaten Maluku Tengah Provinsi si Maluku
5. Kabupaten Butar Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Kabupaten Takalar Provinsi, Sulawesi Selatan menempatkan sebanyak 5 KK dengan 16 jiwa .

Namun yang terealisasi hanya 2 (dua) daerah tujuan kerjasama yaitu:

1. Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo menempatkan sebanyak 5 KK dengan 14 jiwa disesuaikan dengan data 2016

2) Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan

Pemberangkatan calon transmigran untuk tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kepala keluarga, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5 (lima) kepala keluarga. Calon trasnmigran yang diberangkatkan tersebut ditempatkan dilokasi Tanakeke Kabupaten Takalar sebanyak 5 KK dan dilokasi Sandalan Kabupaten Pohuwato sebanyak 5 KK.

Dalam menjalankan urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh DinasTenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi pada tahun 2016 terdapat kendala dan permasalahan serta solusi / tindaklanjut yang telah dilakukan yakni :

1. Target pemberangkatan transmigrasi 20 kepala keluarga, namun hanya bisa memberangkatkan 10 keluarga hal ini dikarenakan sesuai alokasi dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 KK, ada satu daerah tujuan lokasi Transmigran tidak siap menerima karena lahan tidak tersedia.
2. Realisasi anggaran untuk urusan pelaksanaan transmigrasi hanya terserap kurang dari 50%, hal ini dikarenakan ada kebijakan Nasional / daerah yang efisiensi anggaran sebesar 30 %, pemberangkatan Transmigran tidak bisa memberangkatkan 100 % sesuai target karena sesuai alokasi dari Provinsi Jawa Timur.

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

solusi yang dilakukan : melakukan koordinasi dengan Pusat dan Provinsi untuk mencari calon lokasi yang benar clean dan clear dan melakukan penjajagan pada calon lokasi Transmigran sebelum penempatan.



**Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023**

Tabel. 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

| NO | Indikator | SPM / STANDAR NASIONAL | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|-----|------------------------------------|---|-----|---|-------|-------|-------|-----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (12) | (13) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Rasio penduduk yang bekerja | Besaran jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja | % | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,50 | - | - | 87,00 | 87,50 | BPS |
| 2 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Besaran jumlah angkatan kerja terhadap pencari kerja | % | 70,90 | 70,90 | 70,90 | 70,90 | - | - | 70,90 | 70,90 | BPS |
| 3 | Pencari kerja yang ditempatkan | Besaran pencari kerja yang ditempatkan (sesuai Permenakertrans No 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan) | % | 43,50 | 43,70 | 43,90 | 43,11 | 43,4 | - | 43,90 | 43,11 | |

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|---|------|------|-----|
| 4 | Tingkat pengangguran terbuka | Besaran Jumlah penganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja | % | 5,08 | 5,04 | 5,01 | 4,89 | 6,24 | - | 5,01 | 4,89 | BPS |
| 5 | Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja | Terciptanya Wirausaha Baru (WUB) | orang | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 6 | Transmigran yang ditempatkan | Ditematkannya para transmigran | Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Perlindungan tenaga kerja | Ditematkannya CPMI di negara penempatan | Orang | 12 | 30 | 30 | 30 | 12 | - | 30 | 30 | |

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Tabel 2.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 sampai Tahun 2018

| NO | PROGRAM | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------|--|--------|--------|--------|---------|------|-----------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.414.116.700,00 | 1.920.333.700,00 | 2.166.031.489,56 | 2.879.292.390,00 | 3.403.397.400,00 | 2.807.954.900,00 | 1.097.268.879,00 | 1.522.644.916,00 | 1.622.713.126,00 | 2.029.971.288,00 | 2.344.622.017,00 | - | 77,59% | 79,29% | 74,82% | 70,47% | 65,95% | - | 14.591.094.578,56 | 8.516.230.000,00 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.232.855.000,00 | 1.657.485.000,00 | 1.180.215.550,00 | 1.782.541.550,00 | 1.982.528.000,00 | 842.888.000,00 | 2.018.723.040,00 | 1.612.523.400,00 | 1.100.951.584,00 | 1.801.003.880,00 | 1.517.783.914,00 | - | 90,32% | 97,29% | 94,80% | 89,82% | 78,94% | - | 9.608.514.100,00 | 7.843.585.818,00 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - | - | - | - | - | 30.000.000,00 | - | - | - | - | - | 100,00% | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 500.000.000,00 | 95.194.000,00 | 100.000.000,00 | 94.000.000,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 51.304.000,00 | 40.845.000,00 | 77.950.000,00 | 52.078.700,00 | 21.070.000,00 | - | 10,28% | 43,04% | 77,95% | 85,40% | 42,14% | - | 879.134.000,00 | 242.847.700,00 |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMBANGAN SISTEM PELAJARAN CAPAIAN KINERJA | 81.402.250,00 | 117.852.250,00 | 88.988.900,00 | 202.826.900,00 | 183.123.349,00 | 158.798.500,00 | 75.050.250,00 | 64.787.250,00 | 38.152.000,00 | 94.526.500,00 | 182.548.950,00 | - | 92,20% | 54,87% | 97,85% | 46,80% | 84,17% | - | 792.881.249,00 | 435.064.950,00 |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN KUANTITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 19.537.973.000,00 | 11.723.372.085,00 | 15.949.332.134,44 | 14.487.592.500,00 | 10.744.721.500,00 | 3.154.189.000,00 | 17.898.719.210,00 | 8.240.888.385,00 | 4.354.497.948,00 | 10.208.872.233,00 | 7.110.089.850,00 | - | 90,30% | 70,29% | 27,30% | 70,81% | 66,17% | - | 75.637.180.219,44 | 47.873.087.806,00 |
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | 2.201.990.000,00 | 1.122.349.365,00 | 887.238.000,00 | 1.808.072.500,00 | 1.871.550.000,00 | 1.741.395.000,00 | 990.311.950,00 | 848.021.820,00 | 824.944.815,00 | 1.409.639.950,00 | 1.629.896.883,00 | - | 43,18% | 75,56% | 72,08% | 87,83% | 87,08% | - | 9.407.555.885,00 | 5.482.815.218,00 |
| 8 | PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 1.802.854.850,00 | 1.943.137.100,00 | 2.059.694.600,00 | 2.821.069.800,00 | 2.854.289.600,00 | 1.737.243.500,00 | 1.544.247.700,00 | 1.710.991.100,00 | 1.517.899.400,00 | 2.084.813.575,00 | 2.025.175.485,00 | - | 81,21% | 88,09% | 73,70% | 72,08% | 78,30% | - | 18.020.087.280,00 | 8.933.123.244,00 |
| 9 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) | 987.517.800,00 | 1.255.204.000,00 | 1.287.484.000,00 | 2.237.924.000,00 | - | - | 904.818.500,00 | 1.085.234.870,00 | 1.240.672.780,00 | 2.055.768.590,00 | - | - | 90,71% | 87,28% | 95,62% | 91,88% | 0,00% | - | 5.788.129.800,00 | 5.298.498.510,00 |
| 10 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEHATAN SOSIAL | 247.095.000,00 | 451.015.000,00 | 598.138.000,00 | 815.287.500,00 | - | - | 221.387.000,00 | 432.046.300,00 | 512.801.000,00 | 546.095.881,00 | - | - | 89,80% | 95,79% | 86,02% | 88,78% | 0,00% | - | 1.909.506.500,00 | 1.712.339.981,00 |
| 11 | PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR | 85.150.000,00 | 122.320.000,00 | 79.440.000,00 | 90.980.000,00 | - | - | 95.675.000,00 | 82.816.000,00 | 68.395.900,00 | 77.917.500,00 | - | - | 85,48% | 87,70% | 86,08% | 85,68% | 0,00% | - | 357.880.000,00 | 284.804.400,00 |
| 12 | PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG cacat dan tuna grahita | 48.430.000,00 | 48.430.000,00 | 47.402.000,00 | 146.905.000,00 | - | - | 23.050.000,00 | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 123.010.500,00 | - | - | 47,59% | 91,68% | 93,67% | 85,73% | 0,00% | - | 291.167.000,00 | 234.860.500,00 |
| 13 | PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO | 53.810.000,00 | 178.938.000,00 | 128.038.500,00 | 123.938.000,00 | - | - | 47.243.000,00 | 185.888.070,00 | 113.449.500,00 | 74.402.250,00 | - | - | 88,12% | 92,69% | 90,01% | 60,03% | 0,00% | - | 482.818.500,00 | 400.992.820,00 |
| 14 | PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL | 103.265.000,00 | 131.120.000,00 | 143.831.000,00 | 358.685.000,00 | - | - | 68.280.000,00 | 119.264.000,00 | 131.350.000,00 | 308.408.050,00 | - | - | 64,18% | 80,86% | 81,32% | 85,43% | 0,00% | - | 736.871.000,00 | 623.302.050,00 |
| 15 | PROGRAM PEMBIAYAAN KEGIATAN KESEHATAN SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,58% | 89,21% | 78,81% | 85,87% | 0,00% | - | 2.103.485.000,00 | 1.713.808.400,00 |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMBANGAN KELOMPOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 70.100.000,00 | 63.100.000,00 |
| 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | 192.250.000,00 | 219.964.000,00 | 163.919.000,00 | 307.829.000,00 | 355.760.000,00 | 180.780.000,00 | 195.346.000,00 | 98.439.900,00 | 93.664.474,00 | 180.730.220,00 | 128.558.000,00 | - | 80,80% | 44,75% | 57,14% | 58,75% | 35,34% | - | 1.420.282.000,00 | 856.738.594,00 |
| 18 | PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL | 167.935.000,00 | 181.638.000,00 | 172.852.000,00 | 280.783.000,00 | - | - | 182.781.000,00 | 141.621.800,00 | 118.259.700,00 | 151.314.000,00 | 127.747.000,00 | - | 84,18% | 85,11% | 87,64% | 45,50% | 0,00% | - | 985.786.000,00 | 538.942.300,00 |

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Dilihat dari capaian anggaran dan realisasi penyerapan anggaran APBD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2017, dapat dikatakan bahwa dari total anggaran pada 4 (empat) tahun pertama yakni tahun 2013-2017, rata-rata realisasi penyerapannya berkisar 65 % - 80 %.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan program pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, selama 5 (lima) tahun apabila dirata-ratakan, maka realisasi penyerapan terbesar ada pada, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dimana rata-rata realisasi penyerapannya berkisar 70 % 90 %. Sementara itu realisasi penyerapan terendah ada pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi serta Program Transmigrasi Lokal yaitu rata-rata sebesar 36,14 % – 84,33 %.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab relatif rendahnya penyerapan anggaran pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi serta Program Transmigrasi Lokal antara lain :

- ❖ Terkendalanya pengiriman transmigrasi ke lokasi penempatan transmigrasi, disebabkan oleh ketidaksiapan daerah penempatan terkait sarana-prasarana perumahan dan lingkungan transmigrasi di lokasi yang bersangkutan. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua transmigran dapat diberangkatkan ke daerah tujuan pada tahun yang bersangkutan. Pemberangkatan/pengerahan transmigran baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun dikarenakan menunggu kesiapan daerah penempatan. Akibatnya, penempatan transmigran tidak dapat tercapai sesuai target.
- ❖ Realisasi penyerapan anggaran tidak berjalan optimal

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan masih diwarnai dengan besarnya tingkat pengangguran, Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,24% naik sebesar 0.82 % dari tahun 2019 (5,42%). Kenaikan ini merupakan dampak pandemi covid 19 mulai dari kebijakan perusahaan merumahkan karyawannya atau memberlakukan sistem WFH yang berimbas pada penurunan produksi, Perusahaan belum siap melakukan rekrutment tenaga kerja, penurunan penyerapan tenaga kerja baik sektor formal atau sektor informal dikarenakan tidak terlaksananya semua program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (peyebarluaskan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan skill, kompetensi dan sertifikasi pencari kerja, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi link and match) serta Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri yang menyebabkan meningkatnya TPT.

2.4.2 Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan adalah :

- ❖ Banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- ❖ Banyak Lahan untuk di Bangun Perusahaan;
- ❖ Tersedianya Jalan Tol yang melalui Kabupaten Pasuruan.
- ❖ UPT. LKD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

2.4.3 Prestasi

1. Penghargaan Kepada Bupati Kabupaten Pasuruan sebagai Peringkat IV Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tingkat Propinsi Jawa Timur.
2. Penghargaan Anugerah Siddhakarya merupakan penghargaan tingkat provinsi yang diberikan kepada perusahaan dengan produktivitas tinggi dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas tersebut selama tiga tahun berturut-turut
3. `Sertifikat Penghargaan ISO 9001:2015. Providing Service of Job Seeker Card (Antar Kerja 1 Card), Job Vacancies (Antar Kerja 3 Card & Wajib Lapor Lowongan), Placement (Antar Kerja 5 Card & Wajib Lapor Lowongan), Hello Work (Aplikasi Penempatan Tenaga Kerja) Icluding Registration, Re-registration and Proses Information, Issuing Extension IMTA License, Inssuing CTKI Passport Recommendation and Issuing CTKI Shelter License.



Foto 1.1
Penghargaan Kepada Bupati



Foto 1.2
Penghargaan Kepada Bupati



Foto 1.3
Sertifikat Penghargaan ISO
9001:2015

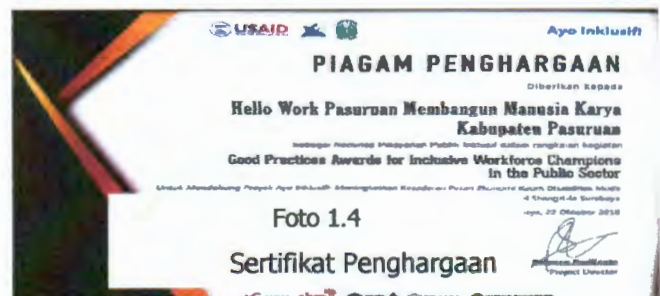


Foto 1.4
Sertifikat Penghargaan

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan penjelasan tantangan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode 2018-2023 (Bab 2), maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai gambaran permasalahan yang akan diselesaikan pada periode berikutnya. Berkaitan beberapa permasalahan belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam PERUBAHAN RPJMD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran PERUBAHAN RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pada periode 2018-2023 pada Perubahan RPJMD. Jalannya roda pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan serta penambahan penduduk.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain:

- ✓ Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan antara lain yaitu :
 - **URUSAN KETENAGAKERJAAN**
 - ❖ Kompetensi Yang Dimiliki Pencaker Masih Terbatas;
 - ❖ Jumlah Angkatan Kerja Sangat Tinggi;
 - ❖ Terjadinya Kasus Kasus Penelantaran PMI;

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

- ❖ Peluang Pencaker Untuk Mengikuti Pelatihan Terbatas;
- ❖ Pelatihan Yang Disediakan Tidak Sesuai Dengan Pasar Kerja;
- ❖ Kualitas SDM Yang Tidak Merata;
- ❖ UMK Tinggi;
- ❖ Harmonisasi Hubungan Industrial Yang Kurang;
- ❖ Fungsi Pengawasan Yang Kurang.

➤ URUSAN TRANSMIGRASI

- ❖ Kurangnya Kesiapan Daerah Tujuan Penempatan Transmigrasi;

Dari permasalahan yang ada maka perlu dilakukan indentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan dan Akar Permasalahan

| | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|
| | (1) | (2) |
| 1 | Kompetensi Yang Dimiliki Pencaker Masih Terbatas | Skill Yang Di Miliki Pencaker Masih Rendah |
| | | Standart Kualifikasi Perusahaan Tidak Sesuai |
| | | Etos Kerja Yang Rendah |
| 2 | Jumlah Angkatan Kerja Sangat Tinggi | Ketersediaan Lapangan Kerja Yang Terbatas |
| | | Jumlah Lulusan Pendidikan Menengah Sangat Besar |
| | | Adanya Relokasi Perusahaan Ke Luar Daerah |
| 3 | Terjadinya Kasus Kasus Penelantaran PMI | Kurangnya Informasi Dan Pemahaman Terhadap Prosedur Dan Regulasi Yang Ada |
| | | Masih Tingginya Pratek Percaloan Keberangkatan Dan Penempatan PMI |

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Kurangnya Kesiapan Daerah Tujuan Penempatan Transmigrasi | Status Lahan Masih Dalam Sengketa |
| | | Ketersediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Masih Belum Tercukupi |
| 5 | Peluang Pencaker Untuk Mengikuti Pelatihan Terbatas | Jumlah Pelatihan Yang Terbatas |
| | | Sanpras Yang Terbatas |
| | | Jumlah Anggaran Pelatihan Terbatas |
| 6 | Pelatihan Yang Disediakan Tidak Sesuai Dengan Pasar Kerja | Perkembangan Pasar Kerja Sangat Fluktuatif |
| | | Kurikulum Belum Mengikuti Perkembangan Jaman |
| | | Analisis Kebutuhan Pelatihan Belum Dilakukan |
| 7 | Kualitas SDM Yang Tidak Merata | UPT. LKD Tidak Memiliki Instruktur Sendiri |
| | | Sistem Rekrutmen Belum Terstandarisasi |
| 8 | Kurangnya Pembinaan LPKS | LPKS Belum Mempunyai Ijin |
| | | Sarana Prasarana LPKS Belum Memadai |
| | | Instruktur Belum Bersertifikasi |
| 9 | UMK Tinggi | Banyak Perusahaan Padat Karya |
| | | Rendahnya Skill Nol Tahun |
| | | Pangsa Pasar Menurun Adanya Pandemi Covid-19 |
| 9 | Harmonisasi Hubungan Industrial Yang Kurang | LKS Bipartit Belum Bekerja Secara Optimal |
| | | Perusahaan Belum Banyak Membentuk LKS Bipartit |
| | | Kurangnya Pembinaan Tentang Pentingnya LKS Bipartit Di Perusahaan |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 10 | Fungsi Pengawasan Yang Kurang | Di Tariknya Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Ke Propinsi |
| | | Kurangnya Pembinaan Tentang Aturan Ketenagakerjaan |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“ MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING “

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi Dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial Dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Desah Berbasis Masyarakat Dengan Cara Mempermudah Aspek Legal Dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat;
2. Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga Dengan Memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas Dan Budaya Guna Mewujudkan Kohesi Sosial;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Penguatan Konektivitas Dan Aksesibilitas Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Memperhatikan Pemanfaatan Segenap Potensi Sumber Daya Alam Secara Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan Sebagai Untuk Konservasi Lingkungan Di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Yang Inovasi, Bersih, Efektif, Akuntabel, Dan Demokratis Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan Pelayanan Dasar Terutama Pelayanan Kesehatan Permukiman Dan Pendidikan Dengan Mengintegrasikan Pendidikan-Pendidikan Formal Dan Non Formal Sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Pembangunan Bidang Tenaga Kerja Merupakan Bagian Dari Misi Ke-1 (Satu) Dengan Tujuan “ **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**”. Sedangkan sasaran Perubahan RPJMD yang ditunjang oleh Dinas Ketenagakerjaan adalah “ **Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru** “dengan indikator “ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** “.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa strategi yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang Tenaga Kerja yaitu :

- ❖ Meningkatkan Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Pencari Kerja serta Tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis
- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah

Dengan arah kebijakan mengarah pada :

- ❖ Dalam rangka peningkatan infrastruktur yang berkualitas melalui dana APBD, DBHCHT Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana pelatihan UPT. LKD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan.
- ❖ Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk wirausaha baru dan dunia industri
- ❖ Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik untuk aparatur maupun masyarakat dan pencari kerja.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

VISI

pembangunan Tahun 2015-2019 kabinet kerja adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI

Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan indonesia yang berdaya saing.

Agenda prioritas pembangunan kabinet kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Tema pembangunan bidang ketenagakerjaan, yaitu pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Agendanya penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasarannya tingkat pengangguran terbuka diharapkan sebesar 4,0 – 5,0 persen pada tahun 2019 dan menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 jt selama 5 (lima) tahun.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas pembangunan kesatu (nawa cita) yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan agenda prioritas pembangunan keenam (nawa cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Bab V Pasal 54 poin 1 tentang Penetapan kawasan strategis, dimana penetapan kawasan strategis dilakukan berdasarkan :

- a) Kepentingan Pertahanan- Keamanan;
- b) Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
- c) Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi;
- d) Kepentingan Sosial - Budaya; serta
- e) Kepentingan penyelamatan lingkungan hidup.

Selain itu dalam pasal 56 disebutkan bahwa :

- ❖ Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang pelaksanaannya meliputi rencana pemanfaatan ruang secara vertikal maupun rencana pemanfaatan ruang didalam bumi

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- ❖ Rencana struktur tata ruang;
 - 1) Struktur tata ruang saat ini;
 - 2) Rencana pola ruang;
 - 3) Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- ❖ RTRW SKPD berfungsi sebagai:
 - 1) Penyelaras Kebijakan Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pasuruan;
 - 2) Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah;
- ❖ Kedudukan RTRW SKPD, yaitu sebagai pedoman bagi:
 - 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PERUBAHAN RPJMD), rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;
 - 2) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- 3) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
 - 4) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - 5) Penataan ruang kawasan strategi kabupaten Pasuruan.
- ❖ Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- 1) Kebijakan dan strategi struktur ruang;
 - 2) Kebijakan dan strategi pola ruang;
 - 3) Kebijakan dan strategi Kawasan strategi Kabupaten.
 - 4) Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - 5) Perwujudan perluasan kesempatan kerja yang efektif, efisien dalam menunjang perkembangan kabupaten sebagai daerah perindustrian dan jasa yang didukung kawasan industri
 - 6) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup ketenagakerjaan;
 - 7) Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan yang terpadu dengan system regional.
- ❖ Strategi untuk terwujudnya pusat-pusat pelayanan perluasan kesempatan kerja yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai daerah yang didukung industri dalam lingkup kawasan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional antara lain :
- 1) Mengembangkan pameran-pameran tentang bursa ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten;
 - 2) Mengembangkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi bagi masyarakat;
 - 3) Pelayanan urusan ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan; Menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pelayanan ketenagakerjaan sesuai dengan skala pelayanannya.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan perluasan kesempatan

kerja yang efektif dan efisien dalam menunjang fungsi kabupaten yang didukung oleh kawasan industri yang ada.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis Pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dan permasalahan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan Isu-isu strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan disusun untuk membenahan dan dicarikan solusinya. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi, disebabkan keterbatasan lowongan pekerjaan/kesempatan kerja;
- 2) Kualitas kompetensi angkatan kerja/pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha;
- 3) Sinergi antar pelaku usaha dengan unsur serikat masih belum optimal;
- 4) Ketidakstabilan konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 5) Pemberangkatan calon transmigran tidak Optimal/sering tertunda keberangkatannya (kuota calon ditentukan oleh pemerintah pusat);
- 6) Optimalisasi operasional di UPT LKD belum optimal karena terkendala SDM Instruktur.
- 7) Adanya pandemi COVID 19 mengakibatkan meningkatny angka pengangguran terutama pada periode awal pandemi di Tahun 2020, pada periode semester akhir 2021 perekonomian mulai membaik seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan Ekonomi, namun sektor ketenagakerjaan masih merasakan dampak utamanya penyerapan tenaga kerja yang tidak sebaik sebelum masa pandemi, dikarenakan masih banyak Perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi memutuskan untuk melakukan efisiensi terutama dari segi perekrutan tenaga kerja baru.

**Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023**

BAB. IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KETENAGAKERJAAN

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian perangkat daerah. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, yang tertuang dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, antara lain :

1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis, berkeadilan dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi, iman dan taqwa.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih maju, mandiri dan dinamis dengan mengoptimalkan potensi daerah, pembangunan wilayah dan kemitraan serta pemeliharaan stabilitas pengembangan dunia usaha.

Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan, ditetapkan tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

" Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru "

dengan Indikator Tujuannya adalah :

" Persentase Partisipasi Angkatan Kerja "

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan ditetapkanlah sasaran Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Sasaran :

" Meningkatkan Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Pencari Kerja serta tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis " .

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah :

1. Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan :

Yang diukur melalui Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar.

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$$

2. Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi

Yang diukur melalui Jumlah Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi dan Jumlah Peserta Pelatihan yang sudah di latih

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah pencari kerja yang sudah dilatih}} \times 100 \%$$

3. Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Yang diukur melalui Jumlah Kasus Yang Terdaftar/Masuk dan Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Aturan Ketenagakerjaan

$$\frac{\text{Jumlah Yang Diselesaikan dengan Aturan Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Kasus yang terdaftar/masuk}} \times 100 \%$$

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Bukan Indikator Kinerja Utama/Non-IKU) yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

- Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN

| NO. | Tujuan | | Sasaran | | Tahun Dasar / Kondisi Awal | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%) | | | | | | | | Kondisi Akhir | | Masa Transisi |
|-----|---|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 |
| | | | | | | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya angka pengangguran terbuka | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 6,11% | 6,02 | 68,6 | 5,08 | 69,5 | 5,04 | 70,1 | 5,01 | 72,5 | 4,89 | 73,5 | 73,5 |
| 2 | Meningkatnya Kompetensi, Perluasan dan Peneempatan Pencari Kerja serta tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis | Meningkatnya Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Pencari Kerja serta tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis | Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan | Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan | 811.710 Jiwa (*Target Indikator Kinerja Baru) | | 80 | 80 | 40 | 80,2 | 40,2 | 80,4 | 40,4 | 80,6 | 40,6 | 40,6 |
| | | | Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi | Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi | 90 Orang | | 80 | 80 | 40 | 80,2 | 40,2 | 80,4 | 40,4 | 80,6 | 40,6 | 40,6 |
| | | | - | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | - | | - | - | - | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas IP | - | NILAI SAKIP | 63,30% | 67,5 | 72 | 73,5 | 80,05 | 80,05 | 81,5 | 81,5 | 83 | 83 | 83 | | |

**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pembangunan perikanan dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi, memacu pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas.

Strategi dalam pembangunan perikanan harus mendukung strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuraun yaitu memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industry 4.0, yang diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif.

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

Berikut hasil indentifikasi SWOT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketrampilan Pencaker, Penempatan, Dan Perluasan Tenaga Kerja

| Strength | Opportunity |
|--|---|
| (1) | (2) |
| SDM yang sesuai dengan kompetensi | Diklat sesuai dengan bidangnya |
| Sarana dan Prasarana yang memadai | Peluang kerja terbuka di segala sektor bidang |
| Didukung adanya regulasi daerah dan pusat | |
| Letak Geografis yang strategis | |
| SDM bidang HI yang kompeten | Peningkatan SDM Mediator |
| Hubungan yang harmonis antara dinas dengan pengusaha dan SP/SB | Optimalisasi Peran dan fungsi Lembaga LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan |
| adanya lembaga LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan | |
| Tersedianya Sarana Prasarana pelatihan UPT.LKD | Sarana Prasarana pelatihan UPT.LKD di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja |
| Adanya CSR perusahaan di Kab. Pasuruan | Pemanfaatan CSR Perusahaan untuk pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja |
| Adanya Peraturan Perundangan tentang Lattas | Peserta pelatihan bisa memunculkan wirausaha baru |
| LPKS yang ada sesuai kejuruan masing-masing | UPT. LKD memiliki instruktur pelatihan sendiri yang memadai |
| | LPK Swasta dan LPK Perusahaan yang ada di Kab.Pasuruan memenuhi standar sesuai SKKNI |

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

| | |
|---|---|
| LPK Perusahaan sudah terbentuk | Semua Perusahaan yang memiliki LPK Perusahaan, harus terdaftar di Disnaker (tanda daftar LPK) |
| Perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang kompeten | Kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan agar produktivitas meningkat |
| | |
| Weakness | Threat |
| (3) | (4) |
| Sosial budaya masyarakat | Persaingan Pencari Kerja dari luar daerah |
| Pendidikan dan skill yang rendah | Pencari kerja tidak semuanya menguasai IT |
| Relokasi Perusahaan | Unjukrasa |
| Jumlah PHK meningkat | Mogok Kerja |
| Kondusifitas wilayah terganggu | |
| Tidak Punya Instruktur sendiri | |
| Tidak ada anggaran yang memadai | |
| Instruktur yang ada belum semuanya memiliki sertifikasi kompetensi yang memadai | |
| Tidak adanya data kebutuhan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja | |
| Belum semua LPK Swasta memenuhi standar | |
| Pelatihan yang disediakan tidak sesuai dengan pasar kerja | Pelatihan disesuaikan dengan permintaan pasar kerja |
| Kualitas SDM peserta pelatihan yang tidak merata | dilaksanakan seleksi sesuai kualifikasi SDM peserta pelatihan |
| Sikap mental tenaga kerja yang kurang. | |
| | |

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah yaitu tahun 2018-2023 untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah :

Tahun 2019

Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter

Tahun 2020

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik

Tahun 2021

Konektivitas Infrastruktur

Tahun 2022

Kelembagaan Ekonomi Desa

Tahun 2023

Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan harus berkesinambungan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Perubahan RPJMD. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (opportunity) dan kendala (threat's) sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan yang dipilih sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

| VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG, SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| MISI : 1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat. | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| TUJUAN 1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | SASARAN 1.2.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja | Penguatan daya saing penduduk usia kerja melalui penguatan UPT Pelatihan Kerja sebagai lembaga strategis untuk membekali kompetensi dan membangun keunggulan kompetisi. | Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. | | |
| | | Mengintensifkan fungsi Kios 3in1 dan meningkatkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha. | | | |
| | | Membangun jaring pengaman TPT melalui Program Pelatihan Alih Kerja (PAKER) atau alih profesi bagi pekerja ter-PHK agar tidak menambah angka penganggur | | | |
| | | Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). | Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. | Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif . | |
| | | | | | Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. |
| | | | | | |

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran mediator.</p> | <p>Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis.</p> |
| | | | <p>Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB).</p> | |
| | | | <p>Meningkatkan koordinasi lintas Provinsi dan Kemnakertrans untuk menambah kuota calon transmigran yang jumlah peminatnya cukup tinggi.</p> | <p>Pembinaan dan penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berkualitas.</p> |
| | | | <p>Melakukan bimbingan pelatihan ketrampilan kerja yang diperlukan sesuai potensi daerah penempatan</p> | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2018–2023 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi dari tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program wajib dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas 1

a. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Adapun Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan :

- ❖ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- ❖ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan :

- ❖ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
- 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Prioritas 1

b. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - ❖ Pelayanan antar Kerja
 - ❖ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - ❖ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - ❖ Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
 - ❖ Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- 3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan :
 - ❖ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - ❖ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - ❖ Job Fair/Bursa Kerja
- 4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- ❖ Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon
- ❖ Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran

- 5) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Prioritas 1

a. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- ❖ Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- ❖ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- ❖ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja

4. Tugas Pilihan

b. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyuluhan Transmigrasi

5. Prioritas Rutin

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

- ❖ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- ❖ Pengadaan Mebel
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 6.1. Dalam rangka mengimplementasikan visi-misi pembangunan daerah agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan beberapa “program unggulan”. Program unggulan tersebut dikemas dalam susunan kata/bahasa yang menarik semacam “jargon” yang telah disampaikan pada masa kampanye. Program unggulan tersebut secara operasional teridentifikasi melalui program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

**Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023**

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja

Berikut adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung percepatan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan. Indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan ditampilkan sebagai berikut.

**Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| O. | Tujuan | | Sasaran | | Tahun Dasar / Kondisi Awal | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%) | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | Masa Transisi |
|----|--|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
| | | | | | | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | Awal | Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya angka pengangguran terbuka | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 6,11% | 6,02 | 68,6 | 5,08 | 69,5 | 5,04 | 70,1 | 5,01 | 72,5 | 4,89 | 73,5 | 73,5 | |
| 2 | Meningkatnya Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Pencari Kerja serta Tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis | Meningkatnya Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Pencari Kerja serta Tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis | Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan | Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan | 811.710 Jiwa (*Target Indikator Kinerja Baru) | | 80 | 80 | 40 | 80,2 | 40,2 | 80,4 | 40,4 | 80,6 | 40,6 | 40,6 | |
| | | | Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi | Persentase Peserta Pencari kerja yang lulus kompetensi | 90 Orang | | 80 | 80 | 40 | 80,2 | 40,2 | 80,4 | 40,4 | 80,6 | 40,6 | 40,6 | |
| | | | - | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | - | | - | - | - | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | |
| 3 | | Meningkatnya Akuntabilitas IP | - | NILAI SAKIP | 65,50% | | 67,5 | 72 | 73,5 | 80,05 | 80,05 | 81,5 | 81,5 | 83 | 83 | 83 | |

Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

BAB VIII PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Renstra, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 menetapkan kaidah pelaksanaan sebagaimana berikut :

- a. Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan Perubahan Renstra Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan masih belum sempurna terkait pemahaman tentang aturan dan atata cara penyusunan yang berbeda-beda.
- c. Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 -2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Pasuruan dan Renstra SKPD).

5.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

5.3 Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang penting di pedomani untuk

Perubahan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2023 dilingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

Program dan Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan didanai oleh APBD Kabupaten dalam rangka mendukung Ketenagakerjaan dengan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah :

- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- ❖ Pencari Kerja Yang Ditempatkan
- ❖ Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka
- ❖ Milai Sakip Dinas Ketenagakerjaan

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | Sumber Dana | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|---|------|----------------|--------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|---|--------|-------------|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (18) | (19) | (20) | | | | | | | |
| | | | | | | | | JUMLAH | 16.694.604.226 | | | 19.007.000.000 | | | 19.007.000.000 | | | 27.419.775.430 | | | | | | |

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pasuruan

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (12) | (13) | (14) | (15) | (15) | (16) | | | (17) | (18) | (19) | (20) | (20) | (21) | | | |
| 1 | Rasio penduduk yang bekerja | | | | 95,58 | 96,47 | 97,00 | 98,00 | 98,25 | 98,50 | 93,89 | 94,68 | 95,70 | 95,93 | 97,24 | 95,82 | 95,03 | 93,89 | 94,58 | 93,76 | 100,13% | 99,44% | 100,25% | 97,78% | 96,72% | 95,32% | 100,73% | 99,03% |
| 2 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | | | | 70,40 | 70,60 | 70,70 | 70,80 | 70,85 | 70,90 | 69,59 | 68,82 | 70,60 | 86,03 | 87,19 | 70,41 | 66,61 | 69,59 | 68,82 | 67,67 | 100,28% | 121,86% | 123,32% | 99,45% | 94,02% | 98,15% | 98,89% | 98,33% |
| 3 | Pencari kerja yang ditempatkan | | | | - | 65,00 | 67,00 | 69,00 | 69,50 | 70,00 | 70,05 | 40,00 | 60,36 | 77,79 | 67,21 | 73,23 | 72,52 | 70,03 | 70,05 | 43,44 | 0,00% | 119,68% | 100,31% | 106,13% | 104,35% | 100,04% | 100,00% | 108,60% |
| 4 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | | | | - | 105,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 61 | 77 | 44 | 41 | 47 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00% | 73,33% | 44,00% | 43,16% | 52,22% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka | | | | 6,43 | 5,80 | 5,20 | 4,60 | 4,00 | 3,50 | 6,02 | 5,08 | 4,34 | 4,43 | 6,41 | 4,18 | 4,97 | 6,11 | 5,42 | 6,24 | 67,50% | 76,38% | 123,27% | 90,87% | 124,25% | 174,57% | 90,03% | 122,83% |

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah

NSPK = Norma Standart Prosedur dan Kriteria

Rasio : Perbandingan antara realisasi dengan target

Kepala Perangkat Daerah

.....

| Tujan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung- jawab | Lokasi | Sumber Dana |
|-------|---------|-----------------|--|--|---|------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|---|---------------------------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| | | 02.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | % Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | | | 50% | Rp. 844.292.000 | 50% | Rp. 7.275.000.000 | 50% | Rp. 7.275.000.000 | 50% | Rp. 7.275.000.000 | 50% | Rp. 7.275.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah PP yang disahkan dan PKB yang didaftarkan | | | 50% | Rp. 846.194.720 | 50% | Rp. 7.275.000.000 | 50% | Rp. 4.775.000.000 | 50% | Rp. 4.775.000.000 | 50% | Rp. 4.775.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Prosentase Pengesahan PP | | | 50% | 175.000.000 | 50% | 175.000.000 | 50% | 175.000.000 | 50% | 175.000.000 | 50% | 175.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Prosentase Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan | | | 25% | 75.000.000 | 25% | 3.800.000.000 | 25% | 2.300.000.000 | 25% | 2.300.000.000 | 25% | 2.300.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.01.08 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Presentase Inventarisasi Data & Informasi Sarana HI & Jamsostek serta pengupahan | | | 1200 Perusahaan dan 6 Kali | 396.194.720 | 1200 Perusahaan dan 6 Kali | 3.300.000.000 | 1200 Perusahaan dan 6 kali | 2.300.000.000 | Perusahaan dan | 2.300.000.000 | Perusahaan dan | 2.300.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Kasus PPH yang diselesaikan | | | 60 Kasus | Rp. 198.097.860 | 40% | Rp. 3.900.000.000 | 40% | Rp. 1.150.000.000 | 40% | Rp. 1.150.000.000 | 40% | Rp. 1.150.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Harmonisasi Hubungan Industrial | | | 10 Kasus | Rp. 178.999.160 | 10 Kasus | Rp. 700.000.000 | 10 Kasus | Rp. 700.000.000 | 10 kasus | Rp. 700.000.000 | 10 kasus | Rp. 700.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Presentase Kasus PPH yang diselesaikan | | | 60 Kasus | Rp. 19.098.200 | 60 Kasus | Rp. 150.000.000 | 60 Kasus | Rp. 150.000.000 | 60 kasus | Rp. 150.000.000 | 60 kasus | Rp. 150.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah SP/SB yang terdaftar | | | 10 LKS dan 12 PUK | Rp. - | 0% | Rp. 250.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Laporan Koordinasi Tim LKS Tripartit | | | 10 LKS dan 12 PUK | Rp. - | 0% | Rp. 300.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | 82 | Rp. 150.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial | % Jumlah Tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK & memperoleh Fasilitas kesejahteraan Sosial | | | 0% | Rp. - | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 500.000.000 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. - | 8 BKK, 160 Peserta | Rp. - | 8 BKK, 160 Peserta | Rp. - | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03.32.08 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor | | | 50% | Rp. 196.930.880 | 50% | Rp. 300.000.000 | 50% | Rp. 300.000.000 | 50% | Rp. 300.000.000 | 50% | Rp. 300.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 3.32.05.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor | | | 5 KK | Rp. 50.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 3.32.05.2.01.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Monitoring Transmigran | | | 5 KK | Rp. 61.994.020 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | 5 KK | Rp. 100.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 3.32.05.2.01.05 | Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi Transmigrasi | | | 5 KK | Rp. 64.996.860 | 5 KK | Rp. 300.000.000 | 5 KK | Rp. 300.000.000 | 5 KK | Rp. 300.000.000 | 5 KK | Rp. 300.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 3.32.05.2.01.08 | Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigrasi yang ditatih | | | 5 KK | Rp. 95.000.000 | 5 KK | Rp. 95.000.000 | 5 KK | Rp. 95.000.000 | 5 KK | Rp. 95.000.000 | 5 KK | Rp. 95.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokal | Sumber Dana | | |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------|---|----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| | | 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkarja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | | | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 45.000.000,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 55.000.000,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 55.000.000,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 55.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Karja | Jumlah Personil layanan antar kerja | | | 0% | Rp. 619.616.300,00 | 0% | Rp. 1.150.000.000,00 | 0% | Rp. 1.150.000.000,00 | 0% | Rp. 1.150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.01.02 | Pelayanan antar Karja | Jumlah Peserta Bantuk Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Forum BKK (FBKK) | | | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 266.833.345,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 250.000.000,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 250.000.000,00 | 60 BKK, 160 Peserta | Rp. 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Peserta Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PB) | | | 4000% | Rp. 120.878.380,00 | 4000% | Rp. 300.000.000,00 | 4000% | Rp. 300.000.000,00 | 4000% | Rp. 300.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.01.04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Disabilitas di sektor formal yang dilayani | | | 0% | Rp. - | 0% | Rp. 995.000.000,00 | 0% | Rp. 995.000.000,00 | 0% | Rp. 995.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Peserta Wirawaha Baru | | | 0% | Rp. - | 0% | Rp. 350.000.000,00 | 0% | Rp. 350.000.000,00 | 0% | Rp. 350.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.02 | Renerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LPTKS terdaftar | | | 0% | Rp. 40.040.000,00 | 0% | Rp. 45.000.000,00 | 0% | Rp. 45.000.000,00 | 0% | Rp. 45.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.02.01 | Penyediaan Sumber Daya Penilaian LPTKS secara Terintegrasi | Jumlah LPTKS terdaftar dalam wilayah Kab. Pasuruan | | | 0% | Rp. 266.970.000,00 | 0% | Rp. 350.000.000,00 | 0% | Rp. 350.000.000,00 | 0% | Rp. 350.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.02.02 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah Monitoring LPTKS yang terdaftar | | | 0% | Rp. 238.096.000,00 | 0% | Rp. 250.000.000,00 | 0% | Rp. 250.000.000,00 | 0% | Rp. 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.03 | Pengalokasian Informasi Pasar Kerja | Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang tersedia melalui Aplikasi dan Job Fair | | | 100% | Rp. 2.398.480.512,00 | 100% | Rp. 9.475.000.000,00 | 100% | Rp. 9.475.000.000,00 | 100% | Rp. 9.475.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pemeliharaan Website Pasar Kerja Online Kab. Pasuruan | | | 100% | Rp. 1.208.384.782,00 | 100% | Rp. 1.700.000.000,00 | 100% | Rp. 1.700.000.000,00 | 100% | Rp. 1.700.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Informasi Lowongan Kerja melalui Aplikasi Hallwork | | | 1 Paket | Rp. 951.777.482,00 | 1 Paket | Rp. 1.300.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 1.300.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 1.300.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Peserta Job Fair / Bursa Kerja | | | 250 Orang | Rp. - | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.04 | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pra dan Purna PMI yang di lindungi | | | 100 Orang | Rp. 251.607.300,00 | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | 160 Peserta | Rp. 200.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.04.01 | Peningkatan Perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PWI) | Jumlah Peserta Sosialisasi Calon PMI dan Pelatihan CPWI | | | 0% | Rp. 50.803.650,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.04.02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPWI yang terdaftar rekom Pasiport | | | 0% | Rp. 50.803.650,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | 0% | Rp. 200.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.04.03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah Peserta Pelatihan Bag Purna PMI | | | 100 Orang | Rp. 150.000.000,00 | 100 Orang | Rp. 150.000.000,00 | 100 Orang | Rp. 150.000.000,00 | 100 Orang | Rp. 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.05 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Perusahaan Penggaji TKA | | | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.04.2.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Perusahaan Penggaji TKA | | | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 100 perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokal | Sumber Dana | | |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|---------------------------|-------------|---|----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| | | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Jumlah Dokumen | | | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen | | | | Rp. - | 1 Dokumen | Rp. 325.000.000,00 | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Peserta pelatihan di UPT, LKD | | | | Rp. - | 1 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Peserta Pelatihan di LPK Swasta dan Perusahaan yang melakukan kerjasama | | | | Rp. - | 1 Dokumen | Rp. 150.000.000,00 | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 02.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Peserta Pelatihan yang lulus uji kompetensi | | | 40% | 1.834.148.000,00 | 40% | 2.501.000.000,00 | 40% | 2.501.000.000,00 | 40% | 2.501.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.01 | Peleaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan | | | 180 Peserta | Rp. 96.848.000,00 | 180 Peserta | Rp. 175.000.000,00 | 180 Peserta | 175.000.000,00 | 180 Peserta | 175.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster kompetensi | Jumlah Peserta pelatihan di UPT, LKD | | | 180 Peserta | Rp. 96.848.000,00 | 180 Peserta | Rp. 175.000.000,00 | 180 Peserta | 175.000.000,00 | 180 Peserta | 175.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.01.01 | Koordinasi Untas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan di LPK Swasta dan Perusahaan yang melakukan kerjasama | | | 16 LPK | Rp. 6.898.597.000,00 | 16 LPK | Rp. 7.356.000.000,00 | 16 LPK | 7.356.000.000,00 | 16 LPK | 7.356.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.01.01 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan Sarana Pelatihan | | | 1 Paket | Rp. 5.272.837.000,00 | 1 Paket | Rp. 5.800.000.000,00 | 1 Paket | 5.800.000.000,00 | 1 Paket | 5.800.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga LPK | | | 18 LPK | Rp. 991.400.000,00 | 18 LPK | Rp. 1.408.000.000,00 | 18 LPK | 1.408.000.000,00 | 18 LPK | 1.408.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.01.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga LPK | | | 16 LPK | Rp. 185.560.000,00 | 16 LPK | Rp. 850.000.000,00 | 16 LPK | 850.000.000,00 | 16 LPK | 850.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah SDM | | | 2 Orang | Rp. 415.747.500,00 | 2 Orang | Rp. 520.000.000,00 | 2 Orang | 520.000.000,00 | 2 Orang | 520.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.03.01 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi | Jumlah SDM | | | 2 Orang | Rp. 10.648.000,00 | 2 Orang | Rp. 45.000.000,00 | 2 Orang | 45.000.000,00 | 2 Orang | 45.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.04 | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah Peserta Konsultasi | | | 10 Perusahaan | Rp. 98.444.500,00 | 10 Perusahaan | Rp. 150.000.000,00 | 10 Perusahaan | 150.000.000,00 | 10 Perusahaan | 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.04.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Peserta Konsultasi | | | 10 Perusahaan | Rp. 55.950.000,00 | 10 Perusahaan | Rp. 75.000.000,00 | 10 Perusahaan | 75.000.000,00 | 10 Perusahaan | 75.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pelatihan | | | 16 Peserta | Rp. 250.705.000,00 | 16 Peserta | Rp. 250.000.000,00 | 16 Peserta | 250.000.000,00 | 16 Peserta | 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.03.2.05.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan | | | 16 Peserta | - | 16 Peserta | - | 16 Peserta | - | 16 Peserta | - | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 02.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | % Pencari Kerja terdaftar yang di tempatkan | | | 40% | Rp. 2.885.127.812,00 | 40% | Rp. 1.755.000.000,00 | 40% | 1.755.000.000,00 | 40% | 1.755.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | Sumber Dana |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---|---------------------------|---|--------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| | | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | | | 3 Dokumen | Rp. 96.846.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | | | 3 Dokumen | Rp. 96.846.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | 3 Dokumen | Rp. 175.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Pembayaran Operasional Kantor | | | 12 Bulan | Rp. 6.398.597.000,00 | 12 Bulan | Rp. 7.556.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 7.556.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 7.556.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang terbayarkan | | | 12 Bulan | Rp. 5.272.637.000,00 | 12 Bulan | Rp. 5.800.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 5.800.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 5.800.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pegawai Honorar dan THL yang terbayarkan | | | 12 Bulan | Rp. 992.400.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.406.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.406.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.406.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.02.03 | Pelaksanaan Pencahayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayar | | | 12 Bulan | Rp. 133.560.000,00 | 12 Bulan | Rp. 350.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 350.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 350.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pembayaran operasional kantor | | | 12 Bulan | Rp. 415.747.500,00 | 12 Bulan | Rp. 520.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 520.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 520.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik | | | 12 Bulan | Rp. 10.648.000,00 | 12 Bulan | Rp. 45.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 45.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 45.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | | | 3kali | Rp. 98.444.500,00 | 3kali | Rp. 150.000.000,00 | 3kali | Rp. 150.000.000,00 | 3kali | Rp. 150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu dan Peserta Rapat | | | 100 Orang | Rp. 55.950.000,00 | 100 Orang | Rp. 75.000.000,00 | 100 Orang | Rp. 75.000.000,00 | 100 Orang | Rp. 75.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi | | | 50 Kali | Rp. 250.705.000,00 | 50 Kali | Rp. 250.000.000,00 | 50 Kali | Rp. 250.000.000,00 | 50 Kali | Rp. 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebelair | | | 1 Paket | Rp. 29.700.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebelair | | | 1 Paket | Rp. 29.700.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 125.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pembayaran Operasional | | | 12 Bulan | Rp. 1.052.527.975,00 | 12 Bulan | Rp. 1.755.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.755.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.755.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang di kirim | | | 900 Surat | Rp. 45.000.000,00 | 900 Surat | Rp. 55.000.000,00 | 900 Surat | Rp. 55.000.000,00 | 900 Surat | Rp. 55.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan untuk Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon | | | 12 Bulan | Rp. 619.618.300,00 | 12 Bulan | Rp. 1.150.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.150.000.000,00 | 12 Bulan | Rp. 1.150.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor | | | 1 Paket | Rp. 286.833.345,00 | 1 Paket | Rp. 250.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 250.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | | | 1 Paket | Rp. 120.678.330,00 | 1 Paket | Rp. 300.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 300.000.000,00 | 1 Paket | Rp. 300.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara | | | 14 Kendaraan | Rp. 1.015.194.059 | 14 Kendaraan | Rp. 995.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 995.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 995.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor | | | 14 Kendaraan | Rp. 475.118.059 | 14 Kendaraan | Rp. 350.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 350.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 350.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas | | | 14 Kendaraan | Rp. 40.040.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 45.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 45.000.000,00 | 14 Kendaraan | Rp. 45.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung yang di perbaiki | | | 2 Gedung | Rp. 266.970.000,00 | 2 Gedung | Rp. 350.000.000,00 | 2 Gedung | Rp. 350.000.000,00 | 2 Gedung | Rp. 350.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | 2.07.01.2.08.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor | | | 3 Paket | Rp. 233.056.000,00 | 3 Paket | Rp. 250.000.000,00 | 3 Paket | Rp. 250.000.000,00 | 3 Paket | Rp. 250.000.000,00 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |

| Tujan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokal | Sumber Dana |
|--|---------------|--|--|--|---|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---|---------------------------|--|-------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| Meningkatkan peran pencari kerja dan penempatan pariusan kerja | 16 | | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor Kantor | Jumlah pemeliharaan Peralatan kantor | 12 kali | 154.860.000 | 12 Kali | 190.860.000 | 12 Kali | 190.860.000 | 12 Kali | 190.860.000 | 12 Kali | 727.440.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 17 | | Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor | 1 Unit | 200.000.000 | 1 Unit | 130.000.000 | 1 Unit | 130.000.000 | 1 Unit | 130.000.000 | 1 Unit | 390.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL | % Peserta Pelatihan yang menjadi wirasaha baru | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 4.000.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | CUKAI | | |
| | 18 | | Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan | Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana | 1 Unit | 600.000.000 | 1 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | 2.100.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | CUKAI | | |
| | 19 | | Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat | Jumlah Peserta Pelatihan | 160 orang | 400.000.000 | 160 orang | 500.000.000 | 160 orang | 500.000.000 | 160 orang | 500.000.000 | 160 orang | 1.900.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | CUKAI | | |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS | Persentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi | 10 | 1.852.002.780 | 10 | 1.808.934.665 | 10 | 2.265.991.518 | 10 | 1.808.934.665 | 280 | 7.225.863.578 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 20 | | Peningkatan Pelatihan Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan | 80 Peserta | 200.000.000 | 80 Peserta | 250.000.000 | 80 Peserta | 400.000.000 | 80 Peserta | 250.000.000 | 80 Peserta | 1.100.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 21 | | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan | 260 Peserta | 724.778.865 | 260 Peserta | 975.909.665 | 260 Peserta | 1.288.966.518 | 260 Peserta | 978.909.665 | 260 Peserta | 3.967.564.718 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 22 | | Pelayanan Sertifikasi Tenaga Kerja dan Akreditasi LPK | Jumlah LPK, Jumlah Peserta Sertifikasi | 12 LPK, 82 Peserta | 327.223.885 | 12 LPK, 82 Peserta | 427.025.000 | 12 LPK, 82 Peserta | 427.025.000 | 12 LPK, 82 Peserta | 427.025.000 | 12 LPK, 82 Peserta | 1.608.298.865 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 23 | | Forum CSR | Jumlah Peserta/Jumlah Pertemuan | 50 Perusahaan | 100.000.000 | 50 Perusahaan | 150.000.000 | 50 Perusahaan | 150.000.000 | 50 Perusahaan | 150.000.000 | 50 Perusahaan | 550.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | % Rasio Penduduk yang bekerja | 85,5 | 1.700.000.000 | 86 | 2.230.000.000 | 86,5 | 2.380.000.000 | 87 | 2.230.000.000 | 87,5 | 8.490.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 24 | | Penempatan dan Bursa Kerja | Jumlah Peserta Pencari Kerja | 4500 Pencari Kerja | 900.000.000 | 4600 Pencari Kerja | 1.200.000.000 | 4500 Pencari Kerja | 1.200.000.000 | 4500 Pencari Kerja | 1.200.000.000 | 4500 Pencari Kerja | 4.500.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 25 | | Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan | 120 Orang | 400.000.000 | 120 Orang | 530.000.000 | 120 Orang | 530.000.000 | 120 Orang | 530.000.000 | 120 Orang | 1.990.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 26 | | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Cetras yang dibarengkan dan Jumlah Kunjungan | 2 KK, 12 Kali | 400.000.000 | 2 KK, 12 Kali | 500.000.000 | 2 KK, 12 Kali | 600.000.000 | 2 KK, 12 Kali | 500.000.000 | 2 KK, 12 Kali | 2.000.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA | Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran | 80 | 1.279.175.558 | 81 | 1.335.571.485 | 82 | 1.485.571.485 | 83 | 1.291.999.292 | 83 | 5.841.317.720 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 27 | | Koordinasi dan Upaya Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah Kasus yang di tangani | 100 Kasus | 510.527.438 | 100 Kasus | 510.527.438 | 100 Kasus | 510.527.438 | 100 Kasus | 510.527.438 | 100 Kasus | 2.042.109.752 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 28 | | Pelayanan dan Pembinaan Parasetratn Kerja dan Kelembagaan | Jumlah Pelayanan Kelembagaan | 12 Bulan | 447.791.820 | 12 Bulan | 504.187.697 | 12 Bulan | 604.187.697 | 12 Bulan | 460.615.554 | 12 Bulan | 2.018.782.768 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | 29 | | Koordinasi dan Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Usulan UMK dan Survey KHL | Usulan UMK, 12 Kali | 320.856.300 | Usulan UMK, 12 Kali | 320.856.300 | Usulan UMK, 12 Kali | 320.856.300 | Usulan UMK, 12 Kali | 320.856.300 | Usulan UMK, 12 Kali | 1.283.425.200 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | JUMLAH | | | | | | 9.250.100.148 | | 10.081.551.900 | | 10.809.488.508 | | 10.108.804.312 | | 40.244.889.468 | | | | |
| 02.07.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelayanan Administrasi Kantor | 100% | | | 9.008.402.584 | 100% | 11.126.000.000 | 100% | 11.126.000.000 | 100% | 11.126.000.000 | Kabupaten Pasuruan | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi | Sumber Dana | | | | |
|--------|---------|------|---|--|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | |
| | | | Pengeraan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Kebutuhan SDM | Jumlah Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi | 1 KSAD | 119.470.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | |
| | | | Kunjungan Dan Evaluasi Transmigrasi Di Lokasi Penempatan | Jumlah Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi | 3 Kali | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | |
| | | | PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL | Jumlah calon Transmigrasi yang siap di berangkatkan | 10 KK | 118.780.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | |
| | | | Penyuluhan Transmigrasi Lokal | Jumlah calon Transmigrasi yang siap di berangkatkan | 60 orang | 75.780.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | |
| | | | Pejatihan Transmigrasi Lokal | Jumlah calon Transmigrasi yang siap di berangkatkan | 20 orang | 48.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor | 100% | | 2.862.775.480 | 100% | | 2.750.000.000 | 100% | | 2.800.000.000 | 100% | | 2.800.000.000 | 100% | | 11.212.775.480 | | |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Yang Dikirim melalui jasa kurir | | | 500 Pucuk | 45.000.000 | 500 Pucuk | 45.000.000 | 500 Pucuk | 45.000.000 | 500 Pucuk | 45.000.000 | 500 Pucuk | 45.000.000 | 500 Pucuk | 180.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran listrik/ air / telepon | 12 Bulan | | 525.000.000 | 12 Bulan | 490.000.000 | 490.000.000 | 12 Bulan | 490.000.000 | 12 Bulan | 490.000.000 | 12 Bulan | 490.000.000 | 12 Bulan | 1.995.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 3 | Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan kantor | Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | | | 1 Unit | 270.000.000 | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 720.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 4 | Pembiinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pembayaran pajak kendaraan | | | 15 Kendaraan | 40.000.000 | 15 Kendaraan | 40.000.000 | 15 kendaraan | 40.000.000 | 15 Kendaraan | 40.000.000 | 15 Kendaraan | 40.000.000 | 15 Kendaraan | 160.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelida kegiatan | | | 12 Bulan | 170.000.000 | 12 Bulan | 170.000.000 | 12 Bulan | 180.000.000 | 12 Bulan | 180.000.000 | 12 Bulan | 180.000.000 | 12 Bulan | 700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Pembelian ATK | | | 4 Kali | 85.508.400 | 4 Kali | 85.508.400 | 4 Kali | 85.508.400 | 4 Kali | 85.508.400 | 4 Kali | 85.508.400 | 4 Kali | 342.018.600 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2000 Eksemplar | 72.256.600 | 2000 Eksemplar | 72.256.600 | 2000 Eksemplar | 72.256.600 | 2000 Eksemplar | 72.256.600 | 2000 Eksemplar | 72.256.600 | 2000 Eksemplar | 287.082.800 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan Rapat dan Tamu | | | 15 Kali | 60.000.000 | 15 Kali | 60.000.000 | 15 Kali | 60.000.000 | 15 Kali | 60.000.000 | 15 Kali | 60.000.000 | 15 Kali | 240.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah | | | 50 kali | 148.240.000 | 50 kali | 148.240.000 | 50 kali | 168.240.000 | 50 kali | 168.240.000 | 50 kali | 168.240.000 | 50 kali | 632.960.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 10 | Penyediaan Jasa Perkantoran | Honor Tenaga Kontrak/THL | | | 12 Bulan | 1.244.000.000 | 12 Bulan | 1.289.000.000 | 12 Bulan | 1.309.000.000 | 12 Bulan | 1.309.000.000 | 12 Bulan | 1.309.000.000 | 12 Bulan | 5.181.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 11 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur | Jumlah Peserta Bimbel | | | 5 orang | 40.000.000 | 5 orang | 40.000.000 | 5 orang | 40.000.000 | 5 orang | 40.000.000 | 5 orang | 40.000.000 | 5 orang | 160.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 12 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan | Laporan Kinerja Tahunan dan Tahunan | | | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 164.789.030 | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 160.000.000 | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 160.000.000 | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 160.000.000 | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 160.000.000 | 1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP | 644.789.030 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Serpas Kondisi Baik | | | 100 | 1.056.146.480 | 100 | 992.045.200 | 100 | | 977.870.555 | 100 | | 977.870.555 | 100 | | 3.973.932.741 | | |
| | | 13 | Pengadaan Mebelier | Jumlah Pengadaan Mebelier | | | 3 Unit | 65.000.000 | 3 Unit | 65.000.000 | 3 Unit | 65.000.000 | 3 Unit | 65.000.000 | 3 Unit | 65.000.000 | 3 Unit | 260.000.000 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 14 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | | | 1 Kali | 168.534.430 | 1 Kali | 130.000.000 | 1 Kali | 130.000.000 | 1 Kali | 130.000.000 | 1 Kali | 130.000.000 | 1 Kali | 558.534.430 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | 15 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas | | | 12 Kali | 467.752.000 | 12 Kali | 446.185.200 | 12 Kali | 462.010.555 | 12 Kali | 462.010.555 | 12 Kali | 462.010.555 | 12 Kali | 1.837.958.311 | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |

| Tujua n | Ses ara n | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gun- jawab | Lokasi | Sumber Dana | | |
|------------|-----------------|------|--|---|---|---------------|-------------------|-----|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|---|--------|-----------------------|--|------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | PROGRAM Peningkatan KESEMPATAN KERJA | Terwujudnya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka | 58% | 1.381.750.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Terpenuhinya Penyebarluasan Job Fair | 4000 Pencaker | 258.000.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan kewirausahaan | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas | 4 Paket/64 peserta | 520.200.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Sosialisasi PERDA IMTA | Jumlah Peserta Sosialisasi | 30 peserta | 100.000.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Sinergi Penempatan Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Sinergi | 32 Peserta | 108.975.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Simtek Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) | Terlaksananya Bimtek | 30 Peserta | 71.450.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Implementasi ISO 9001:2015 | Terpenuhinya ISO | 20 orang | 153.450.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pengembangan dan Sosialisasi Hellowork Pasaruan | Terpenuhinya Sosialisasi Peserta | 20 orang | 50.000.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Monitoring TKA | Terpenuhinya Monitoring | 25 Perusahaan | 39.200.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Terpenuhinya Pembinaan | 500 orang | 80.475.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | PROGRAM PEELINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Memungkinkannya Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan | 80% | 1.272.811.500 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Facilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah kasus | 100 Kasus | 149.100.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Temu Koordinasi Dewan Ketenagakerjaan | Terlaksananya Temu Koordinasi | 8 Kali | 125.925.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Temu Koordinasi lembaga kerjasama Tripartita dan LKS Bipartita | Terlaksananya Pertemuan Temu Koordinasi | 12 Bulan | 97.200.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Peningkatan Peranan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang UMK | Terlaksananya UMK | 12 Bulan | 319.689.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyelesaian PHU/PHK di Luar Peradilan Melalui Mediator | Terlaksananya Penyelesaian PHU/PHK | 30 Kasus | 120.322.500 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Peringatan Hari Buruh Se Dunia | Terlaksananya Peringatan MAY DAYA | 1000 Buruh | 132.075.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Deteksi Dini Penyelesaian Perselisihan melalui Perundingan Bipartit | Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini | 12 Bulan | 106.490.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Sosialisasi Berbagi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan | Jumlah Sosialisasi | 12 Bulan | 50.000.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pembuatan Database Perusahaan | Terpenuhinya Pembuatan Aplikasi | 1 Aplikasi | 172.060.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | Jumlah Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi | 1 KSAD | 219.470.000 | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | Sumber Dana | | |
|--------|---------|------|---|--|---|---------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---|----------------------------|-------------|---|----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Meningkatnya SDM Aparatur | 3 Orang | 40.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal | 3 Orang | 40.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terpenuhinya Pemanuhan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan OPD | 10 DPA, 10 RKA, 5 Lahir | 130.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja OPD | Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja OPD | 10 DPA, 10 RKA, 5 Lahir | 130.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL | Terwujudnya Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 50% | 1.000.000.000 | | | | | | | | | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | DBCHT | | |
| | | | Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan | Tarлакannya Pengadaan Sarana Prasarana UPT LKD | 90 % Pelayanan UPT LKD | 399.960.000 | | | | | | | | | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | DBCHT | | |
| | | | Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat | Terpenuhinya Pelatihan | 160 orang | 495.000.000 | | | | | | | | | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | DBCHT | | |
| | | | Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (MTU) | Terpenuhinya Pelatihan | 64 Orang | 165.040.000 | | | | | | | | | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | UPT LKD Dinas Tenaga Kerja | DBCHT | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Terwujudnya Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 50% | 1.185.220.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Forum Komunikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) | Terpenuhinya Peningkatan Manajemen Training, Sinergi | 20 Orang | 106.875.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Terpenuhinya Monitoring Tenaga Kerja Aning, LLS, BLK dll | 12 Bulan | 99.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Sertifikasi Tenaga kerja | Terpenuhinya Sertifikasi Tenaga Kerja | 12 Bulan | 229.250.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Diklat Fruit Carving (Melukis Buah) | Terpenuhinya Diklat Fruit Carving | 18 orang | 181.900.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Sosialisasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) | Terpenuhinya Sosialisasi LSP | 30 Peserta | 132.495.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Diklat Peningkatan Kapasitas dan Manajemen bagi Organisasi Masyarakat | Terpenuhinya Diklat PKK | 16 Orang | 300.000.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Pelatihan Pengukuran Produktivitas (SP/SPR) | Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan dan Jumlah Peserta Lulus Kelembagaan Kompetensi | 10 orang | 118.750.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |
| | | | Diklat Tabu Rias / Salon | Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan dan Jumlah Peserta Lulus Kelembagaan Kompetensi | 10 orang | 80.010.000 | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU | | |

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Paser

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | Sumber Dana | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---|--------|-------------|---|---------------------------|-----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | | | Target Kinerja | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Meningkatnya Administrasi perkantoran menjadi baik | 90% | 2.892.686.400 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Surat Dinas | 12 Bulan | 45.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pembayaran Rekening Telpn, Internet, Air dan Listrik | 12 Bulan | 845.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 154.890.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) | 12 Bulan | 83.503.400 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 70.263.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 Laptop | 240.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Pengadaan Makan dan Minum | 12 Bulan | 60.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan | 148.240.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Penyediaan Jasa Perkantoran | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perkantoran | 12 Bulan | 1.244.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Meningkatnya Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik | 90% | 857.610.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pengadaan Mebelair | Terpenuhinya Pengadaan Mebelair | 3 Kursi Kerja, 2 Lemari | 65.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 3 Gedung | 110.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | 3 Mobil, 7 Sepeda Motor | 417.750.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | 12 Bulan | 154.890.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |
| | | | Rehabilitasi Bedang/berat Rumah Gedung Kantor | Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor | 2 Gedung | 110.000.000 | | | | | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja | Kantor Dinas Tenaga Kerja | DAU |

Tabel 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DIMAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PASURUAN

| NO | PROGRAM | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | | | | Rasio-rasio Pertumbuhan | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.424.116.788,00 | 1.920.893.700,00 | 2.166.099.489,56 | 2.979.292.390,00 | 3.403.037.400,00 | 2.807.914.900,00 | 2.892.086.400,00 | 2.379.955.000,00 | 1.037.268.679,08 | 1.522.644.516,00 | 1.622.728.126,00 | 2.028.971.369,00 | 2.344.622.011,00 | 2.176.799.186,00 | 1.128.366.871,00 | 1.799.132.940,00 | 77,99% | 79,29% | 74,97% | 70,47% | 69,99% | 77,49% | 98,64% | 79,20% | 19.837.135.979,86 | 18.963.796.872,00 | | |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.292.893.000,00 | 1.637.685.000,00 | 1.160.218.950,00 | 1.782.641.950,00 | 1.992.529.000,00 | 642.888.000,00 | 897.416.000,00 | 477.460.000,00 | 2.014.729.040,00 | 1.612.829.400,00 | 1.100.551.994,00 | 1.601.003.880,00 | 1.517.789.914,00 | 905.698.496,00 | 848.241.915,00 | 866.663.009,00 | 90,32% | 97,29% | 94,89% | 89,62% | 76,54% | 107,97% | 40,02% | 76,54% | 10.943.584.189,00 | 9.462.390.377,00 | | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | - | - | - | - | 80.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | | |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 900.000.000,00 | 98.184.000,00 | 100.000.000,00 | 94.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | 91.904.000,00 | 40.948.000,00 | 77.950.000,00 | 92.078.700,00 | 21.070.000,00 | 84.926.000,00 | 1.800.000,00 | - | 10,30% | 49,40% | 77,99% | 33,49% | 42,14% | 242,81% | 4,90% | - | 918.194.000,00 | 842.671.900,00 | | |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA | 81.402.290,00 | 117.993.260,00 | 98.889.300,00 | 202.426.000,00 | 199.129.949,00 | 198.799.900,00 | 190.000.000,00 | - | 79.050.296,00 | 64.797.290,00 | 98.192.000,00 | 84.826.500,00 | 162.548.850,00 | 342.797.800,00 | 81.296.800,00 | - | 92,20% | 94,97% | 97,69% | 46,60% | 84,17% | 152,90% | 89,46% | - | 922.991.249,00 | 779.194.900,00 | | |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 16.997.979.000,00 | 11.728.972.000,00 | 19.948.892.194,44 | 14.487.992.900,00 | 10.744.791.900,00 | 8.194.189.000,00 | 1.185.220.000,00 | - | 17.896.719.310,00 | 6.240.888.960,00 | 4.354.497.948,00 | 10.208.979.298,00 | 7.110.069.950,00 | 9.071.898.240,00 | 800.929.890,00 | 1.860.266.951,00 | 80,10% | 70,20% | 27,80% | 70,61% | 66,17% | 97,97% | 67,99% | - | 76.811.400.258,44 | 51.899.611.697,80 | | |
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | 2.301.990.000,00 | 1.122.849.360,00 | 867.299.000,00 | 1.608.077.800,00 | 1.871.990.000,00 | 1.741.998.000,00 | 1.981.790.000,00 | - | 990.811.998,00 | 848.021.820,00 | 624.944.915,00 | 1.409.699.950,00 | 1.629.696.888,00 | 1.911.999.900,00 | 489.988.000,00 | - | 43,16% | 76,96% | 72,09% | 97,99% | 87,00% | 78,82% | 33,90% | - | 10.789.805.869,00 | 7.243.706.428,00 | | |
| 8 | PROGRAM PERLINDUNGAN PENGELOMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 1.802.694.850,00 | 1.948.197.100,00 | 2.088.694.600,00 | 2.893.069.600,00 | 2.694.269.600,00 | 1.797.241.900,00 | 1.272.811.900,00 | - | 1.944.247.700,00 | 1.710.993.100,00 | 1.517.699.400,00 | 2.094.018.076,00 | 2.029.175.489,00 | 1.698.044.880,00 | 998.699.290,00 | - | 91,21% | 88,09% | 78,70% | 72,00% | 76,30% | 97,74% | 48,89% | - | 14.292.800.700,00 | 11.163.909.294,00 | | |
| 9 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKOR MITRA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) | 997.617.800,00 | 1.296.204.000,00 | 1.297.484.000,00 | 2.287.924.000,00 | - | - | - | - | 994.818.900,00 | 1.090.914.670,00 | 1.240.672.750,00 | 1.058.769.880,00 | - | - | - | - | 80,71% | 87,26% | 95,62% | 91,80% | 0,00% | - | - | - | 5.708.128.000,00 | 5.296.485.910,00 | | |
| 10 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEHATAN SOSIAL | 247.096.000,00 | 481.018.000,00 | 948.199.000,00 | 615.297.900,00 | - | - | - | - | 221.987.800,00 | 492.046.900,00 | 612.801.000,00 | 946.095.681,00 | - | - | - | - | 89,60% | 99,79% | 88,02% | 88,78% | 0,00% | - | - | - | 1.009.906.900,00 | 1.732.325.991,00 | | |
| 11 | PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR | 63.190.000,00 | 122.820.000,00 | 79.460.000,00 | 90.960.000,00 | - | - | - | - | 38.678.000,00 | 82.816.000,00 | 68.899.800,00 | 77.917.900,00 | - | - | - | - | 98,40% | 67,70% | 64,00% | 85,44% | 0,00% | - | - | - | 297.890.000,00 | 284.804.400,00 | | |
| 12 | PROGRAM PEMBINAAN PANA PEYANGKANG cacat dan trauma | 46.480.000,00 | 46.460.000,00 | 47.482.000,00 | 146.906.000,00 | - | - | - | - | 28.062.000,00 | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 129.010.900,00 | - | - | - | - | 47,99% | 91,99% | 93,67% | 95,78% | 0,00% | - | - | - | 291.167.000,00 | 284.860.900,00 | | |
| 13 | PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO | 63.616.000,00 | 178.998.000,00 | 126.091.600,00 | 129.998.000,00 | - | - | - | - | 47.348.000,00 | 169.868.070,00 | 118.449.900,00 | 74.402.200,00 | - | - | - | - | 80,12% | 92,69% | 90,01% | 60,09% | 0,00% | - | - | - | 482.518.000,00 | 480.993.670,00 | | |
| 14 | PROGRAM PEMBINAAN EKSPANDANSI PENYAKIT SOSIAL | 109.268.000,00 | 191.190.000,00 | 149.891.000,00 | 288.856.000,00 | - | - | - | - | 66.260.000,00 | 119.286.000,00 | 191.980.000,00 | 206.404.000,00 | - | - | - | - | 64,19% | 90,90% | 91,52% | 86,48% | 0,00% | - | - | - | 798.871.000,00 | 629.302.000,00 | | |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEHATAN SOSIAL | 969.800.000,00 | 470.010.000,00 | 664.910.000,00 | 846.648.000,00 | - | - | - | - | 284.706.917,00 | 419.292.417,00 | 476.489.817,00 | 651.177.600,00 | - | - | - | - | 68,58% | 89,21% | 78,81% | 84,47% | 0,00% | - | - | - | 2.103.465.000,00 | 1.738.668.401,00 | | |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN PENGELOMBAK KELOMPOK DAERAH | 70.180.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 69.100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 88,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 70.100.000,00 | 69.100.000,00 | | |
| 17 | PROGRAM PEMBINAAN WILAYAH TRANSKORPORASI | 161.580.000,00 | 218.864.000,00 | 183.919.900,00 | 807.639.000,00 | 898.760.000,00 | 180.760.000,00 | 218.470.000,00 | - | 198.348.000,00 | 90.439.900,00 | 88.644.474,00 | 140.790.220,00 | 138.568.000,00 | 202.694.900,00 | 43.790.000,00 | - | 88,80% | 44,78% | 87,14% | 96,79% | 76,14% | 112,22% | 29,82% | - | 1.639.782.000,00 | 928.296.494,00 | | |
| 18 | PROGRAM TRANSFORMASI LOKAL | 167.995.000,00 | 191.836.000,00 | 172.692.000,00 | 289.789.000,00 | - | - | - | - | 148.621.600,00 | 118.299.700,00 | 193.834.000,00 | 127.747.000,00 | - | 179.781.116,00 | 79.180.000,00 | - | 84,89% | 65,11% | 87,64% | 48,80% | 0,00% | 76,14% | 80,77% | - | 1.104.666.000,00 | 706.498.610,00 | | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS | - | - | - | - | - | - | 834.872.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,17% | 824.872.000,00 | 661.275.000,00 | | |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUKIBAN KESEMPATAN KERJA | - | - | - | - | - | - | - | 1.072.032.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,84% | 1.072.032.000,00 | 1.016.691.000,00 | |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA | - | - | - | - | - | - | - | 591.972.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,97% | 591.972.600,00 | 698.789.000,00 | |
| | TOTAL | 38.138.644.000,00 | 21.698.297.690,80 | 28.973.983.174,00 | 50.650.090.040,80 | 21.299.890.840,00 | 18.948.927.800,80 | 29.498.954.296,00 | 29.498.954.296,00 | 18.616.484.708,00 | 13.168.402.914,00 | 21.478.162.697,00 | 14.962.944.485,00 | 9.879.089.971,88 | 148.091.086.949,80 | 107.891.086.949,80 | 148.091.086.949,80 | 80,17% | 79,29% | 74,97% | 70,47% | 69,99% | 77,49% | 98,64% | 79,20% | 19.837.135.979,86 | 18.963.796.872,00 | | |